

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN PEMENUHAN HAK
KONSTITUSIONAL PEMILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

TESIS

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Magister
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Andalas***



**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

Abstrak

Ory Sativa Syakban, 2420842005, Implementasi Kebijakan Layanan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2026.

Dibimbing oleh Dr. Roni Ekha Putera, M.PA dan Dr. Ria Ariany, M.Si.

Tesis ini terdiri dari 183 referensi yang bersumber dari buku, artikel jurnal, tesis/disertasi, prosiding, peraturan perundang-undangan dan keputusan kelembagaan, instrumen hukum internasional, laporan kelembagaan, serta sumber daring.

Pemenuhan hak konstitusional pemilih berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan melalui pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3), serta dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemilihan dan regulasi teknis Komisi Pemilihan Umum. Namun, keberadaan jaminan normatif tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diterima pemilih. Berbagai permasalahan pada Pemilihan Tahun 2024, seperti ketidakakuratan daftar pemilih, keterbatasan akses informasi, kendala pelayanan bagi kelompok rentan, serta perbedaan kondisi wilayah menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan layanan pemenuhan hak konstitusional pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif pada tiga lokus, yaitu Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kota Sawahlunto. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan pemenuhan hak konstitusional pemilih telah didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang relatif memadai. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara layanan yang tersedia secara normatif dan layanan yang benar-benar diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh pemilih. Kualitas implementasi ditentukan oleh kemampuan penyelenggara menerjemahkan regulasi menjadi pelayanan yang mudah diakses, dipahami, dan disesuaikan dengan kebutuhan pemilih. Perbandingan ketiga lokus menunjukkan bahwa karakteristik wilayah turut membentuk variasi implementasi: Kota Padang menghadapi kompleksitas jumlah dan mobilitas pemilih, Kabupaten Kepulauan Mentawai menghadapi kendala geografis dan aksesibilitas, sedangkan Kota Sawahlunto relatif terbantu oleh skala pelayanan yang lebih kecil dan kedekatan sosial masyarakat.

Kebaruan penelitian terletak pada penempatan pemenuhan hak konstitusional pemilih sebagai rantai layanan publik (*public service chain*) yang menghubungkan layanan pendaftaran pemilih, layanan informasi teknis pemilihan, dan layanan penggunaan hak pilih di TPS sebagai satu kesatuan proses pelayanan.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara layanan normatif dan layanan substantif serta pentingnya karakteristik wilayah dan orientasi pelayanan kepada pemilih dalam menjelaskan variasi implementasi. Temuan tersebut memperkaya penggunaan teori implementasi kebijakan Edward III dalam konteks layanan kepemiluan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal penyelenggara, tetapi juga oleh kemampuan pelayanan beradaptasi dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pemilih.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hak Pilih; Implementasi Kebijakan; Layanan Kepemiluan; Layanan Pemilihan; Pemenuhan Hak; Pelayanan Pemilih.



Abstract

Ory Sativa Syakban, 2420842005, Implementation of Service Policy for the Fulfillment of Voters' Constitutional Rights in the 2024 Regional Elections, Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, 2026. Supervised by Dr. Roni Ekha Putera, M.PA and Dr. Ria Ariany, M.Si. This thesis consists of 183 references drawn from books, journal articles, theses/dissertations, conference proceedings, laws and regulations and institutional decisions, international legal instruments, institutional reports, and online sources

The fulfillment of voters' constitutional rights is grounded in the principles of popular sovereignty manifested through democratic election of regional heads as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 1 paragraph (2), Article 18 paragraph (4), and Article 28D paragraph (3), and is further elaborated in the Law on Regional Elections and technical regulations issued by the General Elections Commission. However, the existence of these normative guarantees does not always correspond to the quality of services received by voters. Various problems identified during the 2024 Regional Elections, including inaccuracies in voter registration, limited access to information, service constraints affecting vulnerable groups, and differences in regional conditions, indicate a gap between policy design and service implementation. This study aims to analyze the implementation of policies for services intended to fulfill voters' constitutional rights in the 2024 Regional Elections in West Sumatra Province from the perspectives of communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure.

This study employed a qualitative approach with a comparative case study design across three research sites: Padang City, Mentawai Islands Regency, and Sawahlunto City. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data credibility was ensured through source, method, and time triangulation.

The findings show that the implementation of policies for services aimed at fulfilling voters' constitutional rights has been supported by relatively adequate communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. Nevertheless, implementation has not yet been fully optimal because a gap remains between services that are normatively available and those that are actually received, understood, and utilized by voters. The quality of implementation is determined by the ability of election administrators to translate regulations into services that are accessible, understandable, and responsive to voters' needs. A comparison of the three research sites demonstrates that regional characteristics also shape variations in implementation: Padang City faces complexities arising from the size and mobility of its electorate; Mentawai Islands Regency faces geographical and accessibility constraints; while Sawahlunto City benefits relatively from a smaller service scale and closer social relations within the community.

The novelty of this study lies in conceptualizing the fulfillment of voters' constitutional rights as a public service chain that connects voter registration services, electoral information services, and services for exercising voting rights at

polling stations as an integrated service process. The study also identifies a gap between normative and substantive services and demonstrates the importance of regional characteristics and a voter-oriented service approach in explaining variations in implementation. These findings enrich the application of Edward III's policy implementation theory in the context of electoral services by showing that successful implementation is determined not only by the internal capacity of election administrators but also by the ability of service delivery to adapt to regional characteristics and voters' needs.

Keywords: Constitutional Rights; Election Services; Electoral Services; Fulfillment of Rights; Policy Implementation; Right to Vote; Voter Services.

